

POLITISASI BIROKRASI DALAM MUTASI JABATAN STRUKTURAL DI PEMERINTAHAN KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021

Dodok Samdana Sukaja¹⁾, Tedi Erviantono²⁾, Piers Andreas Noak³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: dodoksamdana1996@gmail.com¹, erviantono2@yahoo.com², piersandreasnoak@unud.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to determine the politicization of the bureaucracy in the transfer of structural positions in the government of Tabanan Regency, especially related to the political dilemmas faced by the regional head after the Election of Regional Heads. This study is framed using rational choice theory by Barbara Geddes and faction theory by Francoise Boucek. The research method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. The result of this research is that there is a politician's dilemma from the elected regent regarding the transfer of positions in the government of Tabanan Regency. This is because first, the elected regional head wants to ensure that he will last at least his term of office. Second, creating a political machine that is loyal and will support it. Third, the elected regent wants to create an effective government.

Keywords : Bureaucracy, Mutations, Tabanan Regency Government, Political Dilemma.

1. PENDAHULUAN

Sudah menjadi pemahaman di kalangan sarjana ilmu politik serta para pemimpin politik di banyak negara, bahwa sistem birokrasi suatu negara telah menjadi pilar dan faktor penting dalam keberhasilan pembangunan suatu negara. Penguatan peran birokrasi mencakup aspek yang sangat luas dan mengatasi berbagai persoalan birokrasi publik antara lain korupsi, lemahnya daya saing negara, isu lingkungan, sentimen primordial yang mengubah relasi sosial dalam struktur birokrasi yang kondusif akibat pergeseran kekuasaan.

Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam melaksanakan perubahan organisasi aparatur

sipil negara didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara), dalam penjelasan bab umum menggunakan sistem merit dalam proses rekrutmen. Merit system adalah sistem kinerja yang berbasis kompetensi, profesionalisme, terbuka dan memberikan kesempatan serta mendukung setiap pegawai untuk mengembangkan kinerja terbaik bagi organisasi.

Tujuan mutasi adalah sebagai bentuk penyegaran di instansi pemerintah, mengurangi kebosanan pegawai terhadap pekerjaan serta meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang lahir untuk

mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, aparatur sipil negara perlu memiliki integritas, netral, profesional, bebas dari unsur politik, kepentingan, bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik bagi masyarakat dan sebagai unsur perekat dan persatuan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. dan Pancasila.

Mutasi jabatan berdasarkan pertimbangan administratif dan kualitas di Indonesia dan di berbagai negara ternyata sangat politis. Di Kabupaten Tabanan, selama 20 tahun terakhir terdapat satu partai hegemonik yaitu PDI-P dan selama bertahun-tahun didominasi oleh satu keluarga yaitu I Nyoman Adi Wiryatama sebagai Bupati Tabanan tahun 2000-2010, Ni Putu Eka Wiryastuti (putra sulung I Nyoman Adi Wiryatama) sebagai Bupati Tabanan. Bupati Tabanan 2010-2021.

Mutasi jabatan sangat politis ketika politik bersifat hegemonik dan sistem kepartaian tetapi tidak melihat pusat kekuasaan (eksekutif) dan bagaimana memperkuat kekuasaan, salah satunya adalah pemindahan jabatan. Ada dua dimensi yang menjadikan jabatan politik penting. Pertama, menjadi forum rekrutmen untuk memperluas jaringan dan support group. Kedua, berbagai program dan keuangan sangat berguna untuk memperkuat legitimasi dan mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Dugaan kuat kemungkinan sistem kepartaian hegemonik mempengaruhi birokrasi sebagai elemen yang seharusnya netral dari politik terlihat ketika bupati terpilih pada tahun 2021 yaitu I Komang Gede Sanjaya melakukan perpindahan jabatan di pemerintahan Kabupaten Tabanan pada tahun 2021. Meski masih di partai yang sama, yakni PDI-P, balutan nuansa rezim terlihat kental. Seperti diberitakan berbagai media, salah satunya Nusabali.com edisi 10 Juli 2021 dan Baliexpress, 09 Juli 2021, bahwa dalam melakukan mutasi, Bupati terpilih I Komang Gede Sanjaya terindikasi memangkas rombongan mantan Bupati Tabanan. Eka Wiryastuti yang dilakukan secara tertutup di Kantor Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Selain itu, mutasi ini juga terkesan. Belum lagi spekulasi yang beredar, mutasi merupakan pergantian giliran. Pasalnya, beberapa Kepala Dinas yang diungkap memiliki hubungan dekat dengan Bupati sebelumnya. Bupati terpilih I Komang Gede Sanjaya juga tidak memberikan bingkisan terkait mutasi yang ada dan menyerahkan keterangan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tabanan I Gede Susila yang juga merupakan pimpinan daerah untuk informasi. Ketika Bupati enggan memberikan keterangan, tentu akan menimbulkan multitafsir di berbagai pihak. Salah satunya yang menguat adalah munculnya fenomena politisasi birokrasi di Pemkab Tabanan pasca Pilkada 2020.

Beberapa pejabat Eselon II yang diangkat oleh Bupati terpilih antara lain AA Ngurah Agung Satria Tenaya yang merupakan Asisten I Pemerintahan dan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan hasil lelang jabatan tahun 2020.

Bahwa ada teka-teki yang belum terjawab, bagaimana sebenarnya hubungan antara pemimpin terpilih, partai politik, dan birokrasi yang seharusnya netral pada masa rezim berubah tanda kutip bahwa di Kabupaten Tabanan rezim berganti tetapi masih di partai yang sama sehingga bahwa faksi-faksi muncul dalam satu partai.

Konsekuensi dari politisasi birokrasi seperti ini mengakibatkan peran dan fungsi lembaga pemerintahan di Kabupaten Tabanan menjadi kabur dan tidak jelas. Birokrasi sering dijadikan sebagai alat politik praktis dimana loyalitas aparturnya ditanamkan secara ganda, di satu sisi sebagai pelayan publik, di sisi lain memiliki kewajiban untuk setia kepada kepala daerah yang notabene berasal dari pemilu. -pemenang partai politik.

Hal ini menyebabkan birokrat tidak dapat berkonsentrasi pada tugasnya sebagai pelayan publik dan kemudian juga menyebabkan perpecahan di dalam birokrasi. Perkembangan ASN tidak lagi diukur dari kinerja dan kualitas kerja yang baik, tetapi lebih diwarnai oleh kepentingan politik, terutama dalam penempatan birokrat yang terjadi mutasi di pemerintahan Kabupaten Tabanan.

Fenomena inilah yang kemudian membuat peneliti tertarik untuk meneliti "POLITISASI BIROKRASI DALAM MUTASI POSISI STRUKTUR PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021"

Kajian ini akan menganalisis Politisasi Birokrasi dengan melihat relasi kekuasaan yang simetris di balik mutasi jabatan struktural di Kabupaten Tabanan pasca Pilkada I

Komang Gede Sanjaya dan Edi Wirawan pada tahun 2021.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori yang relevan yang dipergunakan pada riset ataupun penelitian ini yakni teori Pilihan Rasional dari Barbara Geddes dan teori Faksi dari Francoise Boucek. Guna memperjelas dilemma politik yang dihadapi oleh Kepala Daerah dalam melaksanakan mutasi dan dampak yang timbul dari hasil mutasi tersebut terhadap partai pendukung Kepala Daerah.

Teori Pilihan Rasional oleh Barbara Geddes

Dilema Politisi, Barbara Geddes menggambarkan perilaku politisi di negara bagian sebagai hasil akhir dari apa yang disebut Pilihan Rasional bahwa pejabat memiliki kepentingan pribadi tetapi bertindak dalam kerangka institusi tertentu. Politisi memposisikan diri untuk membela kepentingan masyarakat apabila kepentingan tersebut sejalan dengan kepentingannya sendiri.

Kerangka kerja ini diambil dari teori politik rasional pada tingkat individu yang menganggap bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang politisi diambil dengan terlebih dahulu memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang nantinya akan diperoleh dari tindakan tersebut. Teori ini berasumsi bahwa individu yang rasional dalam mengambil keputusan dan tindakan, memiliki kebebasan untuk mengambil langkah-langkah yang ada.

Gagasan Barbara Geddes menyatakan bahwa penggunaan politik birokrasi dikemukakan dalam bukunya Politisi Dilema: membangun kapasitas negara di Amerika Latin. Ia menyatakan bahwa kecenderungan penguasaan terus menerus

dalam memanfaatkan birokrasi didasarkan pada 4 alasan (birokrasi eksekutif digunakan dalam pertukaran manfaat yang tiada henti untuk mendukung setidaknya dalam empat cara);

Pertama, Sebagai sumber manfaat khusus bagi konstituen. Dalam konteks ini, birokrasi digunakan sebagai agen distribusi keuntungan. Bahwa ketika politisi menang dalam pemilu, birokrasi seringkali dijadikan agen dalam mendistribusikan keuntungan kepada pendukungnya.

Kedua, birokrasi digunakan sebagai sumber patronase dan keuntungan bagi politisi lain yang mendukung kebutuhan petahana sebagai kepala daerah. Selain kebutuhan untuk tetap berada di pemerintahan, pemimpin eksekutif (incumbent) membutuhkan birokrasi untuk dapat membuat regulasi atau program baru yang dapat digunakan untuk “membeli” dukungan dari politisi di legislatif.

Ketiga, birokrasi digunakan sebagai sumber untuk merekrut anggota dari berbagai organisasi politik yang loyal kepada kepala daerah. Yang mendasari kepentingan dan tindakan tersebut adalah menjadikan birokrasi sebagai mesin politik yang loyal terhadap kebutuhan para politisi yang berkuasa. Hal ini dilakukan melalui kompromi politik terlebih dahulu, terkait dengan menempatkan orang-orang yang dianggap loyal kepada birokrasi untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam birokrasi pemerintahan.

Keempat, aktor menggunakan birokrasi sebagai media untuk mengimplementasikan

kebijakan yang menguntungkan kelompok pendukung di masyarakat. Baik jangka panjang maupun jangka pendek.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ataupun riset ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang mempergunakan data sekunder serta juga primer guna mengetahuinya strategi eksistensi kepemimpinan adat ulu apad Desa Tenganan Pegringsingan.

Penentuan informan dilakukan melalui metode purposive sampling. Responden dipilih sebanyak 4 (empat) orang, yang berasal dari Birokrat Pemerintahan Kabupaten Tabanan dan anggota Partai PDI Perjuangan yang paham dan menguasai mengenai topik penelitian yang diangkat. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Sementara itu data sekunder didapatkannya dari jurnal, buku, serta riset yang sebelum-sebelumnya. Peneliti juga mempergunakannya teknik analisa data yang mencakup penyajian data, reduksi data, serta juga pengambilan sebuah kesimpulan.

4. PEMBAHASAN

Sistem Kekerabatan

Pemerintahan Kabupaten Tabanan saat ini di masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pilkada tahun 2020 yakni Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M. - I Made Edi Wirawan, S.E memiliki visi dan misi Nangun Sat Kerti Loka Bali menuju Tabanan Era baru Aman, Unggul, Mandiri (AUM) sejalan dengan visi Gubernur Bali saat ini yang juga diusung oleh partai yang sama yakni PDI Perjuangan.

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam berbagai

program kerja dan pelayanan publik diperlukan Sumber Daya Manusia yang unggul dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu cara adalah dengan melakukan seleksi dan pergantian jabatan dalam lingkungan Pemerintahan Daerah.

A. Mutasi Jabatan Struktural Pemerintahan Kabupaten Tabanan Tahun 2021

Dalam kurun waktu kurang dari enam bulan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih, pemerintah kabupaten Tabanan telah melakukan mutasi terhadap ASN. Setidaknya ada 8 eselon II dan 43 pejabat eselon III yang tersebar di beberapa Dinas di pemerintahan Kabupaten Tabanan pada Jumat, 9 Juli 2021.

Beberapa pejabat Eselon II yang dilantik Bupati terpilih diantara juga termasuk AA Ngurah Agung Satria Tenaya yang merupakan Asisten I Pemerintahan dan Kestra Setda Kabupaten Tabanan hasil lelang jabatan di tahun 2020.

Interaksi Politik dalam rekrutmen Jabatan di Pemerintahan Kabupaten Tabanan

Teori Pilihan Rasional oleh Barbara Geddes menyatakan bahwa seluruh rangkaian perpindahan jabatan yang dilakukan oleh bupati didasarkan pada kepentingan individu oleh politisi dalam mempertahankan kekuasaannya. Dengan kata lain, struktur insentif individu para politisilah yang mendorong dilakukannya perpindahan jabatan, dan bukan idealisme untuk mewujudkan

impian good governance sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Dalam Politician's Dilemma, Barbara Geddes menggambarkan perilaku politisi di negara bagian sebagai hasil akhir dari apa yang disebut Pilihan Rasional bahwa pejabat memiliki kepentingan pribadi tetapi bertindak dalam kerangka institusi tertentu. Politisi memposisikan diri untuk membela kepentingan masyarakat jika kepentingan tersebut sejalan dengan kepentingannya sendiri.

Kerangka kerja ini diambil berdasarkan teori politik rasional pada tingkat individu yang menganggap bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh politisi diambil dengan terlebih dahulu memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang nantinya akan diperoleh dari tindakan tersebut. Teori ini berasumsi bahwa individu rasional dalam mengambil keputusan dan tindakan, memiliki kebebasan untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan kepentingannya.

Pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang sekurang-kurangnya dapat menjalankan fungsi dasarnya, yaitu pelayanan dalam masyarakat pengatur dan fungsi pengawasan. Dalam mutasi yang dilakukan oleh Bupati terpilih I Komang Gede Sanjaya ternyata juga menggunakan cara ini untuk memastikan setidaknya dia bisa bertahan satu periode kepemimpinannya pemerintah.

Bentuk Interaksi Politik dalam Rekrutmen Pejabat. Rekrutmen pejabat atau pergantian struktural pejabat di pemerintahan selalu dihadapkan pada persoalan politik, terutama pasca

pemilu. Rekrutmen tidak hanya dilakukan untuk mendapatkan pegawai yang akan menduduki suatu jabatan atau jabatan yang lowong. Akibatnya, proses menuju good governance masih terhambat.

Keterlibatan pemerintah dalam upaya pembangunan dilakukan melalui aparaturnya, yaitu aparatur negara. Kualitas aparatur negara sebagai pengambil keputusan juga menjadi indikator penting dalam menumbuhkan kepercayaan publik di tengah kritikan publik terhadap rendahnya kinerja pelayanan publik di segala bidang.

Sehubungan dengan pentingnya peran Aparatur Sipil Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang demikian diperlukan Aparatur Sipil Negara yang profesional. Mutasi adalah kegiatan pemindahan pegawai dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain berdasarkan penilaian kinerja, kompetensi, dan kualifikasi.

Namun, dalam hal ini birokrasi justru dimanfaatkan untuk meraup keuntungan bagi politisi dan kebutuhan kepala daerah untuk mendukung kepentingannya. Salah satunya dengan tetap bertahan dalam kepemimpinannya sebagai Kepala Daerah. Selain itu, birokrasi juga digunakan sebagai alat untuk membuat peraturan atau program kerja yang nantinya dapat bermanfaat sebagai jembatan antara legislatif dan eksekutif.

Akar masalah kepegawaian pada prinsipnya terdiri dari dua hal, yaitu masalah

internal dan masalah eksternal yang mempengaruhi fungsi dan profesionalisme aparatur negara, termasuk masalah politisasi birokrasi. Dalam dinamika birokrasi yang terjadi di Kabupaten Tabanan, terlihat bahwa konflik kepentingan antara Bupati sebagai pucuk pimpinan dan birokrat sebagai perpanjangan tangan Bupati dalam menjalankan kebijakan ternyata menjadi faktor untuk membangun relasi antar pejabat. Di satu sisi, Bupati terpilih akan memilih orang-orang yang dipercaya untuk mengamankan jalannya pemerintahan agar sesuai dengan rencana dan tujuan program. Di sisi lain, kepentingan birokrat adalah untuk mendapatkan posisi yang lebih baik dari sebelumnya.

Dari rangkaian tersebut dapat dimaknai bahwa gambaran kasus di Kabupaten Tabanan, mutasi yang dilakukan oleh bupati terpilih kemudian muncul bahwa para politisi memiliki motivasi dan kepentingan pribadi yang berbeda-beda, dalam hal struktur insentif yang ingin diperjuangkan. Sebaliknya, digunakan sebagai sarana bagi kelompok pendukung untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan yang ada. Baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Dalam konteks inilah ada apa yang dianggap "dilema politisi" yakni saat ia berhadapan menggunakan lembaga strategis di luar dirinya, yakni birokrasi serta berhadapan dengan norma-norma demokrasi yang harus menjadi sandaran dalam proses pemerintahan pada daerah.

B. Dominasi dan Kemunculan Faksi di dalam Tubuh PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan Tahun 2021

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) merupakan partai politik yang selalu

menang dalam pemilu di Kabupaten Tabanan pasca reformasi baik itu pemilu legislatif maupun eksekutif. Dominasi PDIP di Kabupaten Tabanan tidak terlepas dari dominasi I Nyoman Adi Wiryatama yang merupakan Bupati Tabanan tahun 2000-2010 yang kemudian digantikan oleh anaknya yang terpilih sebagai bupati di tahun 2010-2020. Salah satu faktor pendukung bertahannya dominasi PDIP di kabupaten Tabanan adalah birokrat yang loyal terhadap pimpinannya.

Ada dua dimensi yang menjadikan posisi administrasi publik penting bagi kepentingan politik pemimpin daerah. Pertama, menjadi forum rekrutmen untuk memperluas jaringan dan support group. Kedua, berbagai program dan keuangan sangat berguna untuk memperkuat legitimasi dan mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Terlepas dari pentingnya PNS sebagai tulang punggung keberhasilan pembangunan, khususnya di tingkat daerah, kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tergantung pada kesempurnaan aparatur di tingkat daerah yang memiliki profesionalisme tinggi dan bertanggung jawab. Perpindahan jabatan dalam struktur pemerintahan daerah merupakan agenda politik yang harus dilakukan oleh bupati dalam memulai kekuasaannya agar dapat bertahan minimal satu periode kepemimpinan.

Francoise Boucek membedakan fraksi menjadi tiga bagian, yaitu fraksi kompetitif, kooperatif dan degeneratif. Hal ini mengacu pada tipologi perilaku aktor dalam partai politik yang meliputi proses dinamis pembagian

kelompok di dalam partai, tetapi juga berbagai proses perubahan sebagai akibat dari berbagai respon insentif.

Setidaknya apa yang terjadi di lingkungan PDI-P di Kabupaten Tabanan menunjukkan adanya perpecahan yang memunculkan faksi-faksi pada level kompetitif dalam perebutan kekuasaan dan karakter patronase di dalam tubuh partai PDI-P di Kabupaten Tabanan. Faksi-faksi kompetitif terlihat ketika terjadi konflik kepentingan atau perebutan posisi strategis di parpol yang menghadirkan fragmentasi sehingga mengeraskan kubu yang juga terjadi di lingkungan PDI-P di Kabupaten Tabanan.

Karakter patronase juga mempengaruhi fraksi-fraksi di partai politik. Hubungan informal dan personal berpotensi mengancam struktur formal di dalam partai yang dapat disebut sebagai model patronase tradisional karena loyalitas personal lebih menentukan daripada mekanisme formal. Hal ini terutama terjadi di PDI-P, yang terlihat dari loyalitas personal yang lebih besar dibandingkan loyalitas formal di lingkungan PDI-P di Kabupaten Tabanan.

Ketegangan baru-baru ini di PDIP Kabupaten Tabanan, antara lain perpindahan besar-besaran bupati terpilih dan penetapan Ni Putu Eka Wiryastuti sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan suap pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID) 2018 di Kabupaten Tabanan, ternyata merupakan indikasi perpecahan dan munculnya faksi-faksi di lingkungan PDIP di Kabupaten Tabanan.

Berdasarkan temuan di atas, tergambar bahwa pergantian kekuasaan di Kabupaten Tabanan memunculkan faksi-faksi di lingkungan PDI-P, terutama pada tingkat persaingan yang berujung pada perpecahan dukungan antara kelompok I Nyoman Adi Wiryatama, Ni Putu Eka Wiryastuti dan Bupati terpilih I Komang Gede Sanjaya, I Wayan. Koster di lingkungan PDI-P di Kabupaten Tabanan

Analisa Hasil Temuan

Analisis penelitian ini menggunakan teori pilihan rasional Barbara Geddes di tingkat individu untuk memotret mutasi jabatan yang telah dilakukan oleh Bupati Tabanan terpilih pada tahun 2021. Dasar argumentasinya adalah seluruh rangkaian mutasi jabatan dilakukan oleh Bupati Tabanan. bupati didasarkan pada kepentingan individu politisi dalam mempertahankan kekuasaannya dan bukan idealisme untuk mewujudkan impian pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Kerangka pikir ini diambil dari teori politik rasional pada tingkat individu yang menganggap bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh politisi diambil dengan terlebih dahulu memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang nantinya akan diperoleh dari tindakan tersebut. Teori ini berasumsi bahwa individu rasional dalam mengambil keputusan dan tindakan, memiliki kebebasan untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan kepentingannya. Bahwa semua politisi memiliki target untuk bertahan setidaknya satu periode di posisi.

Dalam kasus politisi eksekutif di daerah, seni manajemen untuk meraih popularitas bagi dirinya sendiri mungkin harus ditempuh dengan menerobos struktur birokrasi yang kaku dan tidak fleksibel. Barbara Geddes mengatakan ketika seseorang terpilih pada puncak kekuasaan eksekutif ada tiga hal yang akan dilakukan, yaitu: Pertama, memastikan bahwa dia akan bertahan setidaknya selama masa jabatannya.

kedua, membangun mesin politik yang loyal yang akan mendukungnya. Ketiga, membangun pemerintahan yang efektif.

Gagasan Barbara Geddes menyatakan bahwa penggunaan politik birokrasi dikemukakan dalam bukunya *Politisi Dilema: membangun kapasitas negara di Amerika Latin*. Ia menyatakan bahwa kecenderungan penguasaan terus menerus dalam memanfaatkan birokrasi didasarkan pada 4 alasan (birokrasi eksekutif digunakan dalam pertukaran manfaat yang tiada henti untuk mendukung setidaknya dalam empat cara);

Pertama, birokrasi digunakan sebagai agen distribusi keuntungan. Bahwa ketika politisi menang dalam pemilu, birokrasi seringkali dijadikan agen dalam mendistribusikan keuntungan kepada pendukungnya.

Kedua, birokrasi digunakan sebagai sumber patronase dan keuntungan bagi politisi lain yang mendukung kebutuhan petahana sebagai kepala daerah. Selain kebutuhan untuk tetap berada di pemerintahan, pemimpin eksekutif (incumbent) membutuhkan birokrasi untuk dapat membuat regulasi atau program baru yang dapat digunakan untuk "membeli" dukungan dari politisi di lembaga legislatif.

Ketiga, birokrasi digunakan sebagai sumber untuk merekrut anggota dari berbagai organisasi politik yang loyal kepada kepala daerah. Yang mendasari kepentingan dan tindakan ini adalah menjadikan birokrasi sebagai mesin politik yang setia pada kebutuhan para politisi yang berkuasa. Hal ini dilakukan melalui kompromi politik terlebih dahulu, terkait dengan menempatkan orang-orang yang dianggap loyal kepada birokrasi untuk

menduduki posisi-posisi strategis dalam birokrasi pemerintahan. .

Keempat, aktor menggunakan birokrasi sebagai media untuk mengimplementasikan kebijakan yang menguntungkan kelompok pendukung di masyarakat. Baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Dalam kasus di Kabupaten Tabanan, mutasi yang dilakukan oleh bupati terpilih kemudian terlihat para politisi memiliki motivasi dan kepentingan yang berbeda-beda, ketika menyangkut struktur insentif yang diperjuangkan.

Dalam konteks inilah apa yang dianggap sebagai “dilema politikus” muncul ketika ia dihadapkan pada penggunaan institusi strategis di luar dirinya, yaitu birokrasi dan berhadapan dengan norma-norma demokrasi yang harus menjadi landasan proses pemerintahan daerah. Uraian berikut akan menunjukkan bagaimana masalah tersebut muncul dan pada gilirannya mempengaruhi gambaran besar tentang bagaimana birokrasi di tingkat lokal bekerja. Pertama, dalam konteks ini, birokrasi digunakan oleh Bupati terpilih I Komang Gede Sanjaya sebagai agen distribusi keuntungan yang diperoleh konstituen.

Kedua, Bupati terpilih I Komang Gede Sanjaya menggunakan birokrasi sebagai sumber patronase dan keuntungan untuk menopang kebutuhannya sebagai pemimpin eksekutif. Kemudian ada upaya dari bupati terpilih untuk memikirkan dampak kasus dugaan korupsi yang menimpa bupati

sebelumnya, Ni Putu Eka Wiryastuti, terhadap birokrasi. Meski berada di partai politik yang sama, tetapi ketika mereka berada dalam urusan birokrasi, termasuk dalam jebakan korupsi, yang nantinya dapat mempengaruhi kelangsungan kekuasaan, diperlukan rotasi loyalis bupati sebelumnya.

Ketiga, birokrasi dijadikan sebagai sumber untuk merekrut anggota yang dianggap loyal kepada kepala daerah, sehingga menjadikan birokrasi sebagai mesin politik untuk mendukung kebutuhan bupati di segala bidang. Hal ini dapat dilakukan melalui penempatan birokrat yang loyal kepada Kepala Daerah di pemerintahan

Keempat, penggunaan jabatan digunakan sebagai sarana untuk mengimplementasikan berbagai keuntungan dalam kebijakan oleh politisi yang menguntungkan kelompok kepentingannya. Baik jangka panjang maupun jangka pendek. Inilah yang menurut penulis merupakan dilema politisi. Di satu sisi, sebagai politisi, apa yang dia lakukan untuk masyarakat secara politis benar, tetapi secara administratif-prosedur salah.

Akibat mutasi yang dilakukan oleh bupati terpilih, setidaknya yang terjadi di lingkungan PDI-P di Kabupaten Tabanan menunjukkan adanya perpecahan yang memunculkan fraksi-fraksi pada level kompetitif dalam perebutan kekuasaan dan karakter patronase. dalam partai PDI-P di Kabupaten Tabanan.

5. Kesimpulan

Pada bagian ini penulis akan mengemukakan kesimpulan guna menjawab pertanyaan penelitian yang tercantum dalam rumusan masalah pada bab sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Tabanan mengenai politisasi birokrasi dalam mutasi jabatan struktural di Pemerintah Kabupaten Tabanan, penulis menemukan adanya dilema politisi bagi bupati terpilih terkait mutasi jabatan di pemerintahan Kabupaten Tabanan.

Hal ini disebabkan, pertama, bupati terpilih ingin memastikan bahwa ia akan bertahan setidaknya masa jabatannya. kedua, membangun mesin politik yang loyal dan akan mendukungnya, yang dilakukan dengan menurunkan orang-orang yang dianggap tidak loyal terhadap dirinya sendiri dan memilih birokrat yang dianggap loyal terhadap dirinya sendiri. Ketiga, untuk mencapai tujuan politik yang direncanakan oleh bupati terpilih, ia ingin menciptakan pemerintahan yang efektif, yang berarti pemerintahan yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya fraksi di PDI-P yang mendukung Bupati terpilih I Komang Gede Sanjaya. Hal ini muncul akibat mutasi dari kereta bupati sebelumnya, yaitu Ni Putu Eka Wiryastuti, yang mengakibatkan terbentuknya fraksi pada level kompetitif.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Budiardjo. Meriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo Meriam, *Demokrasi Indonesia demokrasi parlemen dan demokrasi pancasila*, Jakarta, Gramedia, 1996.
- Geddes, Barbara, *Politicians Dilema: Building State Capacity in Latin America*, University of California Press, 1996.
- Hardiyansyah. 2012. *Sistem Administrasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik*. Gava Media: Yogyakarta.
- John A. Pearce II dan Richard B. Robinson, Jr., (2008). *Manajemen Strategis Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Miftah Thoha. 2012. *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Peter Schroder, 2008. *Strategi Politik*, Jakarta, Friedrich-NaumannStiftung, PT Mita Alembana Grafika.
- Sastrohadwiryo, Siswanto B. 2005. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrasi dan Operasional*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Samsudin, Sadili. (2006), Manajemen Sumber Daya Manusia, cetakan ke-1. Bandung :Pustaka Setia.

Surbakti, Ramlan, 1992, Memahami Ilmu Politik, Gramedia Widya Sarana, Jakarta.

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sutopo. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta:UNS.

Skripsi dan Jurnal

Akhsrullah.2014. "Intervensi Pejabat Politik Dalam Mutasi Pejabat Struktural di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/1527-Full_Text.pdf (Diakses dan diunduh pada tanggal 12 Juli 2021 jam 09.00 wita).

M. Adian Firas, "Politik dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi di Indonesia Era Reformasi". Vol, 06. No, 01. Juni 2016. Halm 165. <http://jurnalfuf.uinsby.ac.id>. (Diakses dan diunduh pada tanggal 13 Juli 2021 jam 20.00 WITA).

Firman Bagus Budiono.2017."Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada Kabupaten Lamongan Tahun 2015". <http://repository.unair.ac.id>. (Diakses dan diunduh pada tanggal 13 Juli 2021 jam 20.00 WITA).

Savirani Amalinda, "Dilema Para Politisi di Tingkat Lokal: Antara Mimpi Inovasi dan Demokrasi (Kajian tentang Dilema Politisi Eksekutif di Kabupaten Bantul dan Jember)". <https://jurnal.ugm.ac.id>. (Diakses dan diunduh pada tanggal 10 Desember 2021 jam 19.00wita).

Internet/Website

Rakhmawanto Ajib, "ANALISIS POLITISASI BIROKRASI DALAM PEMBINAAN APARATURSIPILNEGARA".<https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/download/284/207/>. (Diakses pada tanggal 10 Agustus 2021 jam 09.00 wita).

Putri Aisah "Faksi dan Konflik Internal Partai Politik di Era Reformasi". <https://books.google.co.id>. (Diakses dan diunduh pada tanggal 10 Desember 2021 jam 19.00wita).

Website Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Tabanan. <https://www.tabanankab.go.id/>. (Diakses dan diunduh pada tanggal 11 Desember 2021 jam 10.00wita).

Enam Kepala OPD Tabanan di Geser <https://www.balipost.com/news/2021/07/09/203340/Enam-Kepala-OPD-Pemkab-Tabanan...html>. (Diakses pada tanggal 11 Juli 2021 jam 21.00 wita).

Sanjaya Tekan tombol Mutasi Lebih cepat <https://baliexpress.jawapos.com/read/2021/07/09/274561/sanjaya-tekan-tombol-mutasi-lebih->

cepat. . (Diakses pada tanggal 07 Agustus 2021 jam 15.00.00 wita).

Sanjaya Kocok Ulang 8 eselon di Tabanan
<https://www.nusabali.com/berita/98442/bupati-tabanan-kocok-ulang-8-pejabat-eselon-ii>. (Diakses pada tanggal 07 Agustus 2021 jam 16.00.00 wita).